

TESIS

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN
PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS
(Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

***SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU),
INSURANCE, AND THE PROTECTION OF POLICYHOLDER
CREDITORS***

***(An Analysis of the Supreme Court Decision Number 647 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021)***



Oleh:

NATASHA AULIA HAKIMAH

NIM. 2210622099

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS

(Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU), INSURANCE, AND THE PROTECTION OF POLICYHOLDER CREDITORS

***(An Analysis of the Supreme Court Decision Number 647
K/Pdt.Sus-Pailit/2021)***



Oleh:

NATASHA AULIA HAKIMAH

NIM. 2210622099

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG
POLIS**

(Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
NATASHA AULIA HAKIMAH
NIM. 2210622099**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS

(Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Disusun dan diajukan oleh:

NATASHA AULIA HAKIMAH

NIM. 2210622099

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

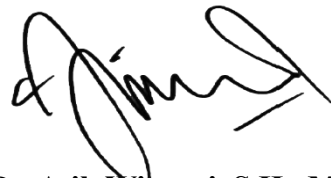
Pembimbing 1



**Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I.,
S.H., M.H.**

NIP. 198910192025211048

Pembimbing 2



Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904

Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN
PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS
(Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

Disusun dan diajukan oleh:

NATASHA AULIA HAKIMAH

NIM. 2210622099

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Pada Tanggal 15 Juli 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I.,
S.H., M.H.

NIP. 198910192025211048

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Pembimbing 2

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.

NIP. 198910192025211048

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Natasha Aulia Hakimah
NIM : 2210622099
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS (Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Natasha Aulia Hakimah
NIM. 2210622099

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Aulia Hakimah

NIM : 2210622099

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS (Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 23 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Natasha Aulia Hakimah

NIM. 2210622099

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil‘aalamiin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul “PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS (Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)” adalah hasil dari proses penelitian dan usaha yang penuh dengan doa dan harapan.

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Henry B H Sitorus, S.T, M.T. selaku Wakil Rektor Bid. Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan.
4. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
6. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.

7. Ibu Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
8. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H selaku penguji Pertama dan Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. selaku penguji Kedua yang telah memberikan masukan dan koreksi yang membangun dalam penulisa Tesis ini.
9. Abi dan Umi, beserta Adik-adik tercinta, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas Do'a dan dukungannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselsaikannya tesis ini.

Saya berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya terutama di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Jakarta, 23 Juli 2026

Penulis

TTD

Natasha Aulia Hakimah

ABSTRAK

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KREDITOR PEMEGANG POLIS

(Analisis Putusan MA Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021).

Natasha Aulia Hakimah (2210622099), Muhammad Helmi Fahrozi, Atik Winanti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi serta mengevaluasi konsekuensi yuridisnya terhadap perlindungan hukum bagi kreditor perorangan, khususnya pemegang polis. Kajian ini bertolak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang mengabulkan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Kresna. Putusan tersebut memunculkan persoalan mengenai kapasitas hukum pemohon dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi. Persoalan ini relevan karena Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membatasi hak mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi hanya kepada Menteri Keuangan, yang kewenangannya kini beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer bersumber pada putusan pengadilan dan regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder bersumber pada literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menjelaskan pola pengaturan dan implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kewenangan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi bersifat eksklusif dan limitatif, dan hanya berada pada Otoritas Jasa Keuangan, demi menjaga stabilitas industri asuransi serta kepentingan kolektif pemegang polis. Kedua, eksklusivitas tersebut membatasi akses langsung kreditor perorangan ke forum litigasi, sehingga menciptakan ketergantungan tinggi pada respons administratif Otoritas Jasa Keuangan ketika terjadi kasus gagal bayar. Kondisi ini berpotensi memperlambat proses penyelesaian utang dan melemahkan posisi tawar kreditor perorangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani permohonan tersebut, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pemegang polis.

Kata Kunci: PKPU Asuransi; Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Kreditor.

ABSTRACT

INSURANCE DEBT PAYMENT OBLIGATION SUSPENSION AND PROTECTION POLICYHOLDER CREDITORS

***(An Analysis of the Supreme Court Decision Number 647 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021)***

Natasha Aulia Hakimah (2210622099), Muhammad Helmi Fahrozi, Atik Winanti

This study aims to analyze the legal standing in petitions for the suspension of debt payment obligations of insurance companies and to evaluate the juridical consequences for the legal protection of individual creditors, particularly policyholders. This study departs from Supreme Court Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, which granted the bankruptcy petition against PT Asuransi Jiwa Kresna. That decision raised concerns about the petitioner's legal capacity in bankruptcy proceedings against insurance companies. This issue is relevant because Article 2 paragraph (5) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations restricts the right to file a bankruptcy or debt suspension petition against an insurance company solely to the Minister of Finance, whose authority now rests with the Financial Services Authority. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The primary legal materials consist of court decisions and relevant regulations, while the secondary legal materials consist of legal literature. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively to explain the regulatory pattern and its implications. The findings reveal two main results. First, the authority to file a petition for the suspension of debt payment obligations of insurance companies is exclusive and limited, and rests solely with the Financial Services Authority, in order to maintain industry stability and protect the collective interests of policyholders. Second, this exclusivity restricts direct access for individual creditors to the litigation forum, thereby creating a high dependency on the Financial Services Authority's administrative response in cases of default. This condition can slow down the debt settlement process and weaken the bargaining position of individual creditors. This study recommends strengthening the supervisory mechanism and transparency of the Financial Services Authority in handling such petitions, in order to provide better legal certainty for policyholders.

Keywords: Insurance PKPU; Financial Services Authority; Creditor Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Kajian Konseptual.....	12
2. Kajian Teori	47
B. Kerangka Pikir	51

C. Definisi Operasional.....	52
BAB III.....	58
METODE PENELITIAN	58
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	58
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	58
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
D. Analisis Bahan Hukum.....	60
BAB IV	62
HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Kedudukan Hukum Legal Standing Otoritas Jasa Keuangan dalam Permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.....	62
B. Eksklusivitas Legal Standing Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Hukum Kreditor Perorangan Asuransi	83
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101